

Analisis Kesiapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang

Vera Juniyengsi

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

* Corresponding author: verajuniyengsi13@gmail.com

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sistem yang di selenggarakan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna untuk mengefisienkan pelayanan bagi pengguna. Untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman dan masif nya perkembangan teknologi berbasis digital yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi secara digital, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi solusi yang paling praktis untuk mempermudah layanan masyarakat secara daring. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian Analisis Kesiapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk mengetahui seberapa siap Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan SPBE yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu tren Perkembangan Indeks SPBE daerah, Jenis Pelayanan *e-Government*, SDM, Infrastruktur Teknologi Digital, dan dukungan Kebijakan Pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data studi litelatur. Hasil Penelitian menunjukan Kabupaten Sidrap menunjukkan kesiapan yang semakin matang dalam penerapan SPBE, namun beberapa aspek, seperti pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital di masyarakat, masih perlu ditingkatkan agar SPBE dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: SPBE, *e-government*, kesiapan penyelenggaraan, pelayanan

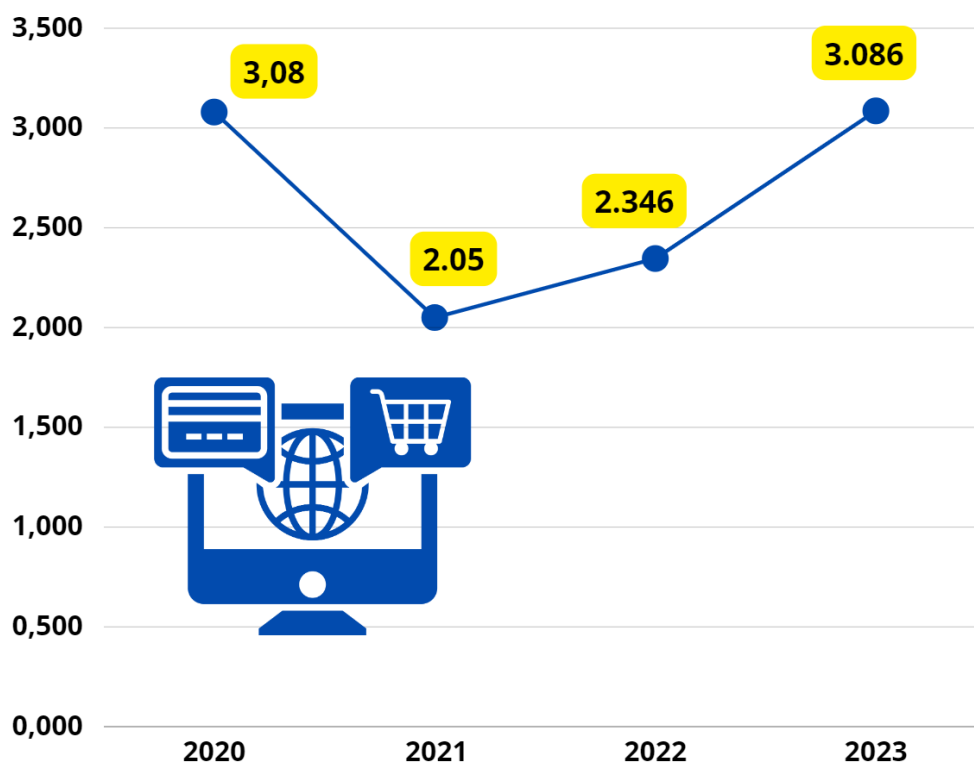
Pendahuluan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan komponen utama dari *E-Government*, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada berbagai pengguna, termasuk instansi pemerintah, pegawai ASN, sektor bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya (Kemen PANRB, 2024). Di era globalisasi, penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama karena perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang berlangsung dengan sangat cepat (Juli Astuti et al., 2021). Kemajuan pesat ini telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menerima informasi dengan lebih cepat dan akurat, kapan saja dan di mana saja (Sinta et al., 2024). Kebebasan ini memungkinkan individu untuk mempelajari informasi dari berbagai sumber, sehingga mendorong penyedia untuk menyajikan konten yang lebih modern dan relevan (Rahmadi et al., 2021). Teknologi kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dan pemerintah di seluruh dunia terus berinovasi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang lebih efisien.

Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan

oleh Choirunnisa et al. (2023), SPBE mencakup berbagai aplikasi seperti portal pemerintah elektronik dan aplikasi seluler, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi serta layanan publik secara daring. Hal ini membawa kemudahan bagi masyarakat dalam menelusuri layanan tanpa terhambat oleh kendala fisik dan geografis, sehingga meningkatkan aksesibilitas pelayanan secara signifikan. Dengan adanya SPBE, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah. Penyelenggaraan SPBE tidak hanya sekedar teknologi maju, namun juga perlu dipersiapkan dari berbagai aspek seperti infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), aturan dan prosedur. Kesiapan *e-Government* dapat diukur dalam enam bidang utama, yaitu kesiapan organisasi, kesiapan jaringan, kesiapan masyarakat, kesiapan teknologi, kesiapan konten, dan kesiapan hukum.

Merespon perkembangan dunia digital yang begitu masif, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa semua instansi pemerintah harus menggunakan Sistem Pemerintahan sebagai bentuk integrasi *E-Government*. Berdasarkan peraturan Presiden, SPBE dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan pelayanan publik yang bermutu dan terjangkau (Bisma, 2022). Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami peningkatan signifikan dalam indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024, evaluasi terhadap implementasi SPBE tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemprov Sulsel meraih predikat *baik* dengan nilai 3,086. Capaian ini menandai kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 indeks SPBE Pemprov Sulsel hanya 2,05 dengan predikat *cukup*, dan meningkat pada tahun 2022 dengan nilai 2,35. Berikut ini grafik indeks SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 1. Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2023 (Portal Satu Data Kementerian PAN RB)

Kabupaten Sidrap, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, telah mengambil langkah penting dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah daerah menekankan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian SPBE diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada analisis kesiapan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh sejauh mana Kabupaten Sidenreng Rappang telah mempersiapkan infrastruktur, kebijakan, dan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi SPBE yang modern, efisien, serta mampu merespons kebutuhan pelayanan publik secara digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang tepat mengenai pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan SPBE di Kabupaten Sidrap.

Tinjauan Pustaka

E government Readiness

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, *e-readiness* merupakan tingkat kesiapan organisasi, individu, atau negara dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan hasil yang optimal. Tingkat kesiapan atau *e-readiness* memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi *e-overnment*, karena tingkat kesiapan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula dalam implementasi *e-government*. Kesiapan *e-government* suatu negara bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya ekonomi, manusia, teknologi, kemauan atau minat pemerintah dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kecukupan infrastruktur dan penyediaan layanan, aksesibilitas konten, kegunaan dan keakuratan informasi digital dan layanan elektronik, bahasa, kepercayaan dan kerahasiaan. Selain itu, ketepatan kesiapan infrastruktur, budaya nasional dan peran serta masyarakat sangat berperan dalam pengembangan *e-government* agar teknologi dapat terimplementasi dengan sukses (Nugroho & Purbokusumo, 2020).

E-Government Readiness adalah wujud kemampuan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. *E-Government Readiness* merupakan penilaian kesiapan aktor utama dalam penerapan *E-Government* di Indonesia. Dengan melihat metode evaluasinya, analisis *E-Readiness* meliputi: Infrastruktur teknologi, penggunaan atau adopsi TI dalam masyarakat maupun bisnis, kapasitas SDM, kebijakan pemerintah dan perkembangan bisnis sektor TI. Menurut Wisnujaya, analisis terhadap *E-Government Readiness* dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang pemerintah (*Government e readiness*) dan sudut pandang masyarakat pengguna (*User/citizen e readiness*). Adapun Faktor-Faktor *e readiness* meliputi faktor kesediaan (*Willingness factor*) dan faktor kapasitas (*capacty factor*) (Majapahit & Hexagraha, 2021). Faktor-faktor yang berhubungan dengan *government e readiness* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Faktor-Faktor *E Government Readiness*

Faktor	Willingness	Capacity
E- Leadership	√	√
Culture	√	
E- Governance		√
Human Resources		√
ICT Infratructure		√
Business Climate		√

Sumber: Majapahit & Hexagraha, 2021

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintahan adalah sistem yang berfungsi menjalankan otoritas dan kekuasaan untuk mengelola aspek sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara atau wilayah. Definisi lain menyebutkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas atas pelaksanaan kekuasaan negara (Jabarnur,

2022). Pemerintah juga dapat dimaknai sebagai otoritas tertinggi yang mengelola jalannya suatu negara. Menurut Budialjo, pemerintahan mencakup seluruh kegiatan yang berasal dari kedaulatan dan kemerdekaan negara. Salah satu inovasi dalam pemerintahan modern adalah *e-Government*, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam lembaga dan otoritas publik. Teknologi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam hubungan tata kelola antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Melalui *e-Government*, diharapkan dapat tercipta transparansi yang lebih baik, peningkatan pendapatan, pengurangan biaya operasional, serta pencegahan korupsi.

Keberlanjutan pemerintahan digital didukung oleh peningkatan transparansi dan akuntabilitas. SPBE memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik dengan lebih mudah dan cepat, serta menciptakan transparansi yang lebih besar. Data yang tersedia secara publik menjadi dasar bagi partisipasi aktif warga dalam memantau dan mengevaluasi otoritas serta memperkuat hubungan antara otoritas dan masyarakat (Engkus et al., 2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki peran krusial dalam mengakselerasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang efisien dan responsif. Kebijakan ini, tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, membawa sejumlah manfaat signifikan bagi transformasi digital pemerintahan Indonesia (Kemen PANRB, 2024).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan pemerintahan kepada para penggunanya. Pengguna SPBE ini mencakup pemerintah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam sektor ekonomi. Tujuan utama SPBE adalah membentuk pemerintahan yang transparan, bersih, efektif, dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Penerapan SPBE juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam implementasi *e-Government* di lembaga pemerintah. Langkah awal dalam penerapan SPBE adalah penyusunan Rencana Induk Nasional SPBE, yang berfungsi sebagai pedoman untuk tata kelola teknologi informasi di pemerintahan dalam jangka waktu 20 tahun.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan menggunakan platform elektronik, dimungkinkan untuk mengelola internet, mengurangi kontrol dan waktu yang diperlukan untuk memproses dokumen dan meminta layanan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan, melacak status permohonan dan menerima pemberitahuan secara online, sehingga menghemat waktu dan tenaga bagi pihak berwenang dan masyarakat. Peran sistem pemerintahan elektronik dalam meningkatkan akses pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan efisiensi saja. Sistem ini juga memberikan manfaat lain seperti transparansi yang lebih besar, partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan pemantauan yang lebih baik terhadap hasil-hasil pemerintahan. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah, rencana pembangunan dan anggaran melalui portal elektronik pemerintah. Mereka juga dapat menyampaikan masukan, saran, dan pengaduan melalui media elektronik, sehingga

mempererat hubungan antara pihak berwenang dan masyarakat (Choirunnisa et al., 2023).

Berdasarkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan SPBE Tahun 2023, implementasi sistem *e-Government* (SPBE) akan diukur menggunakan *Level Framework* SPBE. Struktur penilaian tingkat kematangan mempunyai tiga komponen utama. *Pertama*, Domain mengacu pada area penerapan SPBE yang dievaluasi. Setiap domain memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek *e-Government*, seperti tata kelola, layanan publik, dan infrastruktur TI. *Kedua*, Aspek adalah bagian berbeda dari domain yang menjadi fokus evaluasi lebih lanjut. Bagian ini menguraikan aspek-aspek penting dalam pelaksanaan SPBE, seperti bagian kebijakan, bagian pelayanan, dan bagian keamanan informasi. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang penerapan dan pengembangan komponen SPBE tertentu dalam suatu perusahaan. *Ketiga*, Indikator adalah informasi spesifik yang diukur dalam setiap situasi. Indikator digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu komponen di area tertentu secara kuantitatif atau kualitatif. Indikatornya dapat mencakup, tingkat adopsi teknologi, kualitas layanan elektronik, dan tingkat keamanan sistem (Miswar et al., 2022).

Dalam struktur ini, domain berisi satu atau lebih elemen, yang masing-masing memiliki banyak indikator. Kerangka penilaian ini membantu menilai tingkat kematangan SPBE lembaga publik. Setiap indikator memberikan gambaran spesifik yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan SPBE serta memetakan wilayah yang memerlukan perhatian (Kemen PANRB, 2024).

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada pemikiran *post-positivisme*, yang digunakan untuk mengkaji berbagai hal dalam situasi alamiah dengan penulis sebagai alat utamanya, sedangkan pendekatan deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan data yang dikumpulkan, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum atau menggeneralisasikannya (Sugiyono, 2019).

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menyajikan atau mendeskripsikan bahan penelitian secara rinci tentang permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yang melibatkan studi literatur dari berbagai dokumen yang relevan, berita, serta dokumen resmi pemerintah yang mendukung pokok bahasan. Setiap tahap pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang digunakan.

Tahap pertama, analisis eksploratif, berfungsi sebagai upaya awal dalam memahami konteks dan cakupan permasalahan. Pada tahap ini, peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan artikel berita, guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang topik yang akan diteliti. Analisis eksploratif membantu peneliti mengidentifikasi aspek-aspek penting dari permasalahan yang mungkin memerlukan penelaahan lebih lanjut.

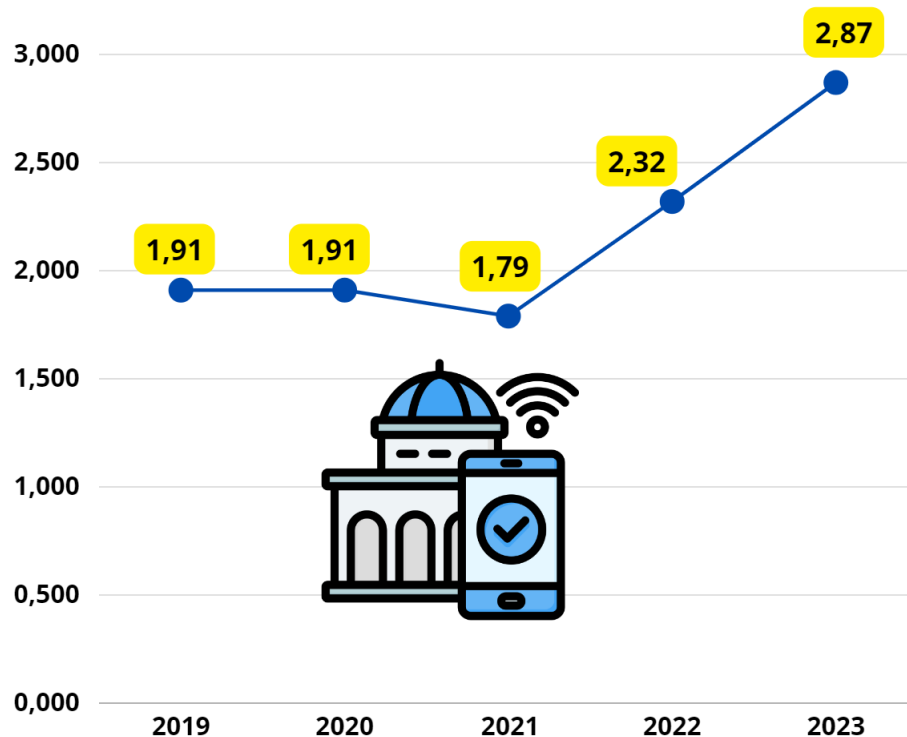
Tahap kedua, telaah dokumen, dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dari dokumen resmi yang terkait dengan pokok bahasan, seperti laporan pemerintah, peraturan daerah, dan catatan institusional. Telaah dokumen ini berfokus pada memahami kebijakan, strategi, dan praktik yang telah diterapkan dalam konteks penelitian, sekaligus memvalidasi data dan informasi yang diperoleh dari literatur sebelumnya. Data yang diperoleh dari tahap ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan bukti empiris yang lebih terstruktur dan faktual.

Dengan pendekatan bertahap ini, penelitian kualitatif deskriptif memastikan bahwa setiap aspek dari permasalahan dapat dijelaskan secara mendalam, memberikan dasar kuat untuk interpretasi dan analisis lebih lanjut mengenai kesiapan dan penerapan kebijakan atau praktik dalam konteks penelitian.

Hasil dan Pembahasan

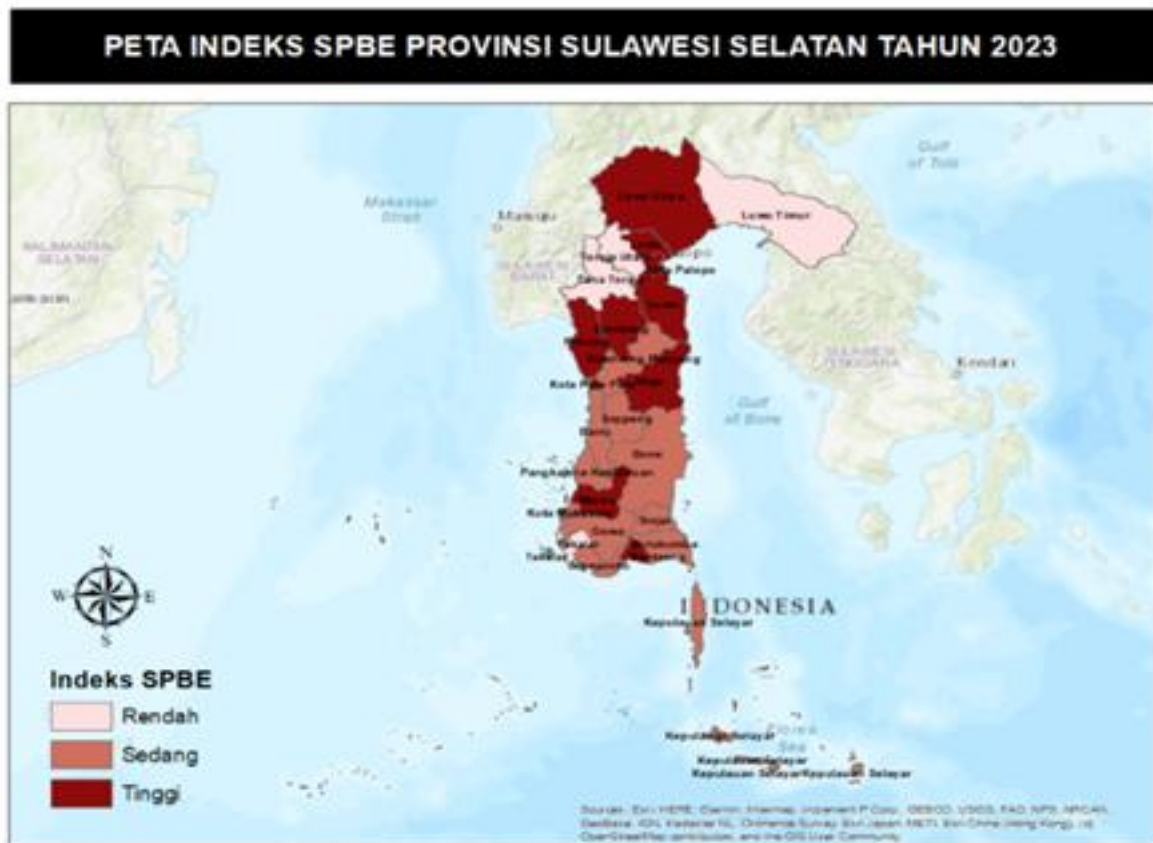
Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran yang semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir sebagai langkah strategis untuk memodernisasi tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan menciptakan transparansi serta akuntabilitas. Kabupaten Sidrap, sebagai salah satu wilayah yang sedang mengadopsi SPBE, perlu melakukan kajian kesiapan dalam menerapkan sistem ini. Analisis kesiapan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sidrap bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah siap mengimplementasikan teknologi tersebut.

Perkembangan SPBE di Kabupaten sidrap mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal penerapannya, Kabupaten Sidrap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur teknologi yang belum memadai serta rendahnya literasi digital dikalangan aparatur pemerintah dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi SPBE pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dimana Kabupaten Sidrap pada tahun 2019 hanya memperoleh indeks 1,91 dengan predikat cukup. Berikut Grafik indeks SPBE Kabupaten Sidrap dari tahun 2019-2023.



Gambar 2. Indeks SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang (Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPBE tahun 2019-2023)

Gambar 2 menunjukkan tren perkembangan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan data yang ditampilkan, indeks SPBE mengalami fluktuasi sebelum akhirnya menunjukkan peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, nilai indeks SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada angka yang sama, yaitu 1,91. Hal ini menunjukkan presentase dalam penerapan SPBE pada tahun-tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan di mana indeks turun menjadi 1,79, yang dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam proses transformasi digital di Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan dalam indeks SPBE yang meningkat menjadi 2,32. Diketahui bahwa ini menunjukkan tren yang semakin baik dalam implementasi kebijakan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana indeks mencapai angka 2,87, yang merupakan pencapaian tertinggi selama periode tersebut. Oleh karena itu, gambar 1.1 menunjukkan adanya tren peningkatan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah beberapa tahun menghadapi stagnasi dan penurunan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik berbasis digital seiring dengan kemajuan teknologi dan penerapan strategi kebijakan yang lebih efektif.



Gambar 3. Peta Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2023)

Berdasarkan peta indeks SPBE Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki indeks SPBE yang berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pelaksanaan SPBE, masih banyak ruang yang signifikan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut hingga mencapai kategori tinggi. Indeks yang berada dalam kategori sedang mengindikasikan adanya kesiapan yang belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan SPBE. Hal ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih mendalam aspek-aspek yang memengaruhi kesiapan implementasi SPBE. Aspek kesiapan meliputi jenis pelayanan *E Government*, infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang diperlukan untuk menjalankan SPBE secara efektif.

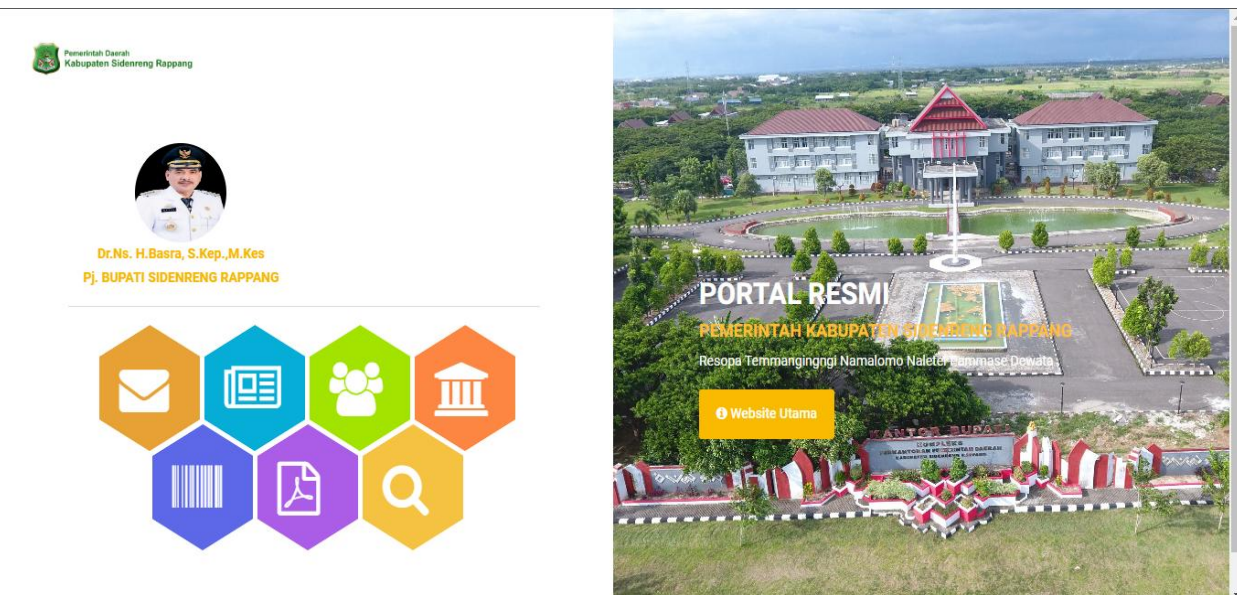
Jenis pelayanan E Government di Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam penerapan SPBE, salah satu kunci utama adalah layanan *E-Government* yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik digital. Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bagian dari provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya mengadopsi berbagai layanan *E-Government* untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Keberadaan dan ketersediaan *E-Government* menunjang layanan masyarakat terpadu dan berbagai

E-Government memiliki fitur pelayanan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh pelayanan *E-Government* di Kabupaten Sidenreng Rappang:

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap adalah sebuah website yang menyajikan berbagai informasi dan layanan kepada masyarakat Kabupaten Sidrap, Sulawesi. Website ini mencakup profil pemerintah yang memberikan informasi mengenai struktur organisasi, visi, misi, dan profil pejabat pemerintah. Selain itu, portal ini juga menyediakan berita dan pengumuman terkini tentang kegiatan pemerintah serta informasi lainnya yang relevan. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang layanan publik, seperti pengurusan dokumen dan izin, serta data dan statistik mengenai Kabupaten Sidrap, termasuk demografi dan ekonomi. Tidak ketinggalan, terdapat galeri foto dan video yang mendokumentasikan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap berfungsi sebagai sumber informasi yang akurat dan terkini, memperkuat transparansi serta keterlibatan publik dalam pemerintahan. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap dapat diakses melalui alamat website ([Pemkab Sidrap, 2024](#)).



Gambar 4. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap

a. Sipengaja Kabupaten Sidrap

Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIPENGAJA) merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dalam pemerintahan, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini merupakan pengembangan dan optimalisasi dari sistem SIPJB (Sistem Informasi Pengelolaan Jasa dan Barang) yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. SIPENGAJA berperan penting dalam mengoptimalkan setiap tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga tahap monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan. Dengan fitur-fitur

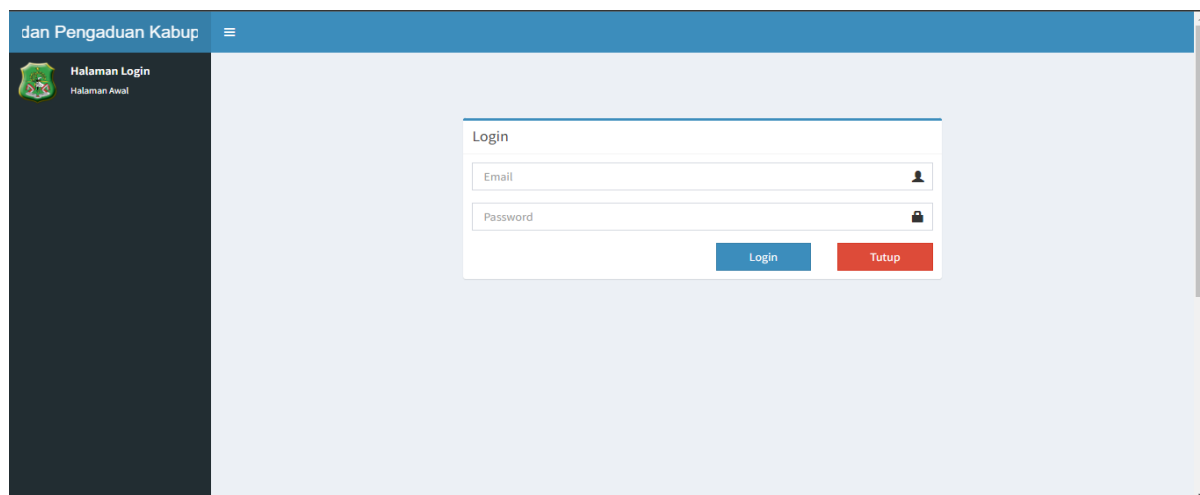
yang disediakan, SIPENGAJA diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh proses pengadaan.



Gambar 5. Sipengaja Kabupaten Sidrap

b. Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan (SIAP)

Website Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan Sidrap adalah platform yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada pemerintah Kabupaten Sidrap, Sulawesi. Sistem online ini memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pemerintahan dengan cara memberikan umpan balik, saran, dan kritik, yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan layanan dan kebijakan. SIAP Sidrap dapat diakses melalui alamat website ([Diskominfo Sidrap, 2021](#))



Gambar 6. Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan

Berdasarkan data dari Kabupaten Sidenreng Rappang, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memiliki situs web resmi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan publik dan informasi. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki situs

yang dapat diakses melalui portal utama pemerintah daerah di ([Pemkab Sidrap, 2024](#)). Begitu juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selain tersedia di portal utama, juga memiliki situs web mandiri di ([Disdikbud Kab. Demak, 2020](#)) Berikut beberapa rangkuman SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang beserta website yang tersedia untuk masing-masing dinas ([Pemkab Sidrap, 2024](#)).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidrap: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Bertugas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. SKPD ini berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui pelatihan dan pendampingan. Di bidang perlindungan anak dan perempuan, mereka fokus pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak-hak anak, dan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di desa ([Sidrapkab., 2016](#)).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berperan dalam pengembangan kualitas pendidikan dan pelestarian kebudayaan lokal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya Sidrap ke dalam kurikulum pendidikan. Program mereka meliputi peningkatan kompetensi guru, pengembangan fasilitas pendidikan, serta kegiatan pelestarian budaya dan bahasa daerah ([Disdikbud Kab. Demak, 2020](#)).

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB)

Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan program KB. SKPD ini berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan primer, vaksinasi, serta program edukasi kesehatan masyarakat. Program KB yang mereka kelola bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera serta mengurangi angka kelahiran yang tidak direncanakan ([Dinkes, 2024](#)).

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas ini fokus pada penyebaran informasi publik dan pengembangan teknologi komunikasi di Sidrap. Mereka memiliki peran kunci dalam menyebarkan informasi pemerintah, melayani transparansi publik, serta memperluas akses internet dan informasi teknologi di daerah-daerah terpencil. Dinas ini juga berkontribusi pada upaya digitalisasi layanan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses ([Diskominfo, 2022](#)).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Memfasilitasi investasi dan izin usaha di Sidrap. Dengan menyediakan layanan terpadu satu pintu, SKPD ini berfungsi untuk mempercepat proses perizinan dan menarik investor lokal maupun internasional. Fungsi ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan kemudahan berbisnis ([Parta, 2023](#)).

Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil

Mengurus administrasi kependudukan dan layanan sosial bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial untuk warga kurang mampu. Dinas ini memainkan peran penting dalam pendataan penduduk, pelayanan kartu identitas, dan akta kelahiran. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan sosial dan rehabilitasi bagi masyarakat rentan, seperti kaum miskin dan penyandang disabilitas ([Dinsos, 2024](#)).

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya udara, termasuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi, pengelolaan air sungai, dan konservasi sumber daya air. Dinas ini berperan penting dalam mendukung sektor pertanian dan menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Manajemen sumber daya air yang baik membantu mencegah banjir dan kekeringan, terutama di wilayah pertanian ([Sidrapkab, 2013](#)).

Dinas Pekerjaan Umum (PU), Penataan Ruang, dan Perhubungan

Dinas ini belum memiliki website, namun tersembunyi adalah menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Mereka juga bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang wilayah dan pengelolaan transportasi umum. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi di Sidrap.

Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Memiliki fungsi penegakan peraturan daerah (Perda) serta pemadaman kebakaran. Mereka bertanggung jawab atas keamanan dan memperbaiki masyarakat serta menjalankan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Dinas ini berperan dalam memastikan lingkungan yang aman dan tertib, serta memberikan perlindungan pada aset-aset publik dan masyarakat dari risiko kebakaran ([Dinas Pol PP, 2024](#)).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Bertugas mengawasi aktivitas perdagangan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi konsumen. SKPD ini berperan dalam mendukung keberlanjutan pasar dan UMKM, mengendalikan distribusi barang penting, dan melaksanakan program perlindungan konsumen. Melalui kegiatan ini, Dinas Perdagangan berupaya menciptakan pasar yang sehat dan adil ([Disperdagin, 2024](#)).

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Memfasilitasi pengembangan pemuda, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Sidrap. Dinas ini memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreasi dan berprestasi di bidang olahraga, serta mempromosikan destinasi wisata Sidrap. Pemberdayaan pemuda dan promosi wisata dapat membantu meningkatkan daya tarik daerah serta mendorong perekonomian berbasis pariwisata ([Kemenpora Sidrapkab, 2024](#)).

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Menyediakan layanan di bidang pertanian, pangan, dan perikanan. Peran utama mereka adalah mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan produksi pertanian, dan mengelola perikanan yang berkelanjutan. Dinas ini memberikan pelatihan

dan bantuan teknis bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk lokal ([Dispertan Sidrapkab, 2024](#)).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Mengelola layanan perpustakaan dan kearsipan daerah. Dinas ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, menyediakan akses informasi, serta mengarsipkan dokumen dan data penting pemerintah. Melalui pengelolaan arsip yang baik, mereka mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan ([Zulkarnain, 2020](#)).

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Bertugas mendukung perkembangan koperasi dan UMKM serta melaksanakan program ketenagakerjaan dan transmigrasi. Peran mereka meliputi pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan bagi UMKM, dan penyaluran tenaga kerja. Ini penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong perekonomian kerakyatan ([Diskop UKM Sidrapkab, 2024](#)).

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

Mengelola perumahan rakyat, penataan kawasan organisasi, serta pemeliharaan lingkungan hidup. SKPD ini bertugas membangun perumahan layak huni bagi masyarakat rendah, mengelola tata ruang, serta melestarikan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan. Upaya ini penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi masyarakat Sidrap ([Pelaihari, 2017](#)).

Layanan-layanan pemerintah daerah tersebut berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik. Berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sidrap menyediakan situs web yang dapat diakses masyarakat untuk informasi dan layanan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki situs utama dan situs khusus di disdikbud.sidrapkab.go.id. Dinas lain, seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyediakan layanan digital melalui situs web yang memfasilitasi pengurusan izin dan layanan investasi, sementara Dinas Kesehatan menyediakan informasi mengenai layanan kesehatan dan pengendalian penduduk. Portal pemerintah daerah Sidrap di ([Pemkab.Sidrap, 2024](#)) menjadi pusat akses untuk berbagai informasi, dari struktur organisasi hingga layanan publik, yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pemerintahan.

Secara keseluruhan, ketersediaan website pada sebagian besar SKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya upaya peningkatan akses layanan digital kepada masyarakat. Namun, tidak semua SKPD mengadopsi layanan berbasis elektronik secara menyeluruh, dan perlu dilakukan perbaikan serta peningkatan dalam hal penyediaan infrastruktur teknologi serta pengembangan konten layanan yang lebih komprehensif. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui SPBE yang lebih optimal.

Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi merupakan komponen utama dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Infrastruktur teknologi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencakup berbagai fasilitas yang mendukung pelayanan publik, pengembangan wilayah, dan administrasi pemerintahan. Tanpa infrastruktur yang memadai, penyelenggaraan SPBE tidak akan mencapai hasil yang optimal, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang semakin meningkat (Choirunnisa et al., 2023). Di Kabupaten Sidenreng Rappang, upaya penerapan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung layanan *E-Government* terus dioptimalkan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Beberapa desa, seperti Desa Bulu Wattang, Carawali, Kanie, dan Lagading, telah mulai mengimplementasikan layanan berbasis situs web untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Dalam implementasinya, tersedia perangkat komputer dan jaringan internet yang cukup baik, yang memungkinkan pengoperasian situs desa meskipun kadang menghadapi kendala dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi ini. Dalam hal perangkat keras dan lunak, Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan infrastruktur digital, antara lain mencakup perangkat jaringan dan pusat data.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi ketersediaan jaringan telepon dan internet (3G/4G/Lainnya) secara garis besar telah dijangkau secara menyeluruh pada semua Kabupaten salah satunya Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Adapun detail persebaran beserta tipe jaringannya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak ada
Kepulauan Selayar	47	19	13	5
Bulukumba	118	17	1	-
Bantaeng	63	4	-	-
Jeneponto	103	10	-	-
Takalar	91	8	-	1
Gowa	153	13	1	-
Sinjai	64	15	1	-
Maros	97	5	1	-
Pangkajene Dan Kepulauan	75	12	2	2
Baru	44	8	1	1
Bone	317	47	4	2
Soppeng	65	5	-	-
Wajo	173	16	-	1

Kabupaten/Kota	4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak ada
Sidenreng Rappang	97	5	3	-
Pinrang	91	14	3	1
Enrekang	80	28	14	3
Luwu	168	25	7	4
Tana Toraja	113	16	2	14
Luwu Utara	137	10	1	13
Luwu Timur	119	8	1	1
Toraja Utara	102	41	6	2
Kota Makassar	152	1	-	-
Kota Parepare	21	1	-	-
Kota Palopo	37	7	4	-
Sulawesi Selatan	2527	335	65	50

Sumber: Buku dalam Angka Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) telah terjangkau jaringan internet, terutama 4G/LTE yang mencakup 97 desa/kelurahan. Selain itu, 5 desa/kelurahan masih menggunakan jaringan 3G, sementara 3 desa lainnya mengandalkan 2,5G. Tidak ada desa di Sidrap yang sepenuhnya tanpa akses internet. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan perkembangan infrastruktur jaringan di Sidrap yang sudah cukup memadai untuk mendukung layanan e-government, meskipun masih ada kesenjangan kecil dalam kualitas jaringan antarwilayah. Upaya peningkatan akses yang lebih merata menjadi penting agar infrastruktur teknologi mampu memenuhi kebutuhan layanan digital secara optimal di seluruh desa.

Berita terbaru mencatat bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menerima penghargaan sebagai TP2DD Kabupaten Terbaik 2024 di Sulawesi. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memperluas digitalisasi, terutama dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kabupaten Sidrap dalam mengembangkan infrastruktur digital yang mendukung efisiensi pelayanan publik. Dalam konteks ini, pengembangan infrastruktur digital tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berupaya meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan publik secara keseluruhan. Prestasi yang diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024 di Jakarta, menegaskan peran penting digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Keberhasilan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam transformasi digital ini menjadi fondasi yang kuat untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendukung langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik di era digital serta mencerminkan komitmen Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membangun lingkungan digital yang siap mendukung penerapan SPBE yang optimal dan berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Sidenreng Rappang

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber Daya Manusia yang mumpuni menjadi faktor pendorong dalam pemantapan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sidrap, karena dalam proses perencanaan persiapan SPBE, Sumber Daya Manusia diperlukan untuk memastikan Sistem berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kompetensi SDM di sektor pemerintahan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan SPBE (La Adu et al., 2022).

Kualitas dan kompetensi SDM pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi SPBE, karena penerapan teknologi informasi memerlukan pemahaman yang baik dan keterampilan yang memadai di kalangan aparatur. Pemerintah Kabupaten Sidrap telah menginisiasi berbagai pelatihan berbasis kompetensi, seperti yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam bidang teknologi dan manajemen digital (Mulia, 2016). Selain itu, peluncuran aplikasi digital seperti SiPeNgaja (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) menjadi sarana bagi SDM di lingkungan pemerintahan untuk beradaptasi dengan sistem digital dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital juga terlihat dari komposisi pendidikan pegawai yang cukup baik, dengan mayoritas aparatur memiliki tingkat pendidikan Sarjana. Ini memberikan dasar yang kuat untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi, mempercepat proses digitalisasi, serta memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan dengan baik dan efektif. Komitmen ini menunjukkan bahwa SDM di Sidrap tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidrap, kondisi ketersediaan jumlah pegawai memperlihatkan variasi dalam hal jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut adalah analisis kesiapan SDM di Kabupaten Sidrap yang meliputi aspek komposisi gender, pendidikan, serta kesiapan dalam menghadapi digitalisasi dan teknologi informasi:

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), kondisi ketersediaan jumlah pegawai menurut jenis kelamin secara garis besar kurang merata antara laki-laki dan perempuan, Adapun detail persebaran beserta tipe jaringannya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	1.978	39,27%
Perempuan	3.058	60,72%
Total	5.036	100%

Sumber : BKD Kab. Sidrap keadaan Desember 2019

Berdasarkan data kepegawaian, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sidrap menunjukkan distribusi yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan. Dari total 5.036 PNS, jumlah pegawai perempuan mendominasi dengan 3.058 orang atau setara dengan 60,72% dari total pegawai. Sementara itu, jumlah pegawai laki-laki tercatat sebanyak 1.978 orang atau 39,27% dari keseluruhan PNS. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam komposisi PNS, di mana jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki dengan selisih sekitar 21,45%. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat pentingnya keseimbangan gender dalam pelayanan publik dan implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kualitas SDM di Kabupaten Sidrap dapat diukur berdasarkan tingkat pendidikan para pegawai yang berperan dalam pelayanan publik. Sebelum membahas data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sidrap berdasarkan tingkat pendidikan, penting untuk memahami peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan ([Suhartono et al., 2020](#)). Pendidikan yang memadai tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan beragam jenjang pendidikan yang dimiliki oleh PNS, kita dapat melihat bagaimana latar belakang pendidikan mereka berkontribusi terhadap kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Berikut ini adalah data mengenai jumlah PNS di Kabupaten Sidrap berdasarkan tingkat pendidikan dari semua jenjang pendidikan.

Tabel 4. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase %
S.3	2	0.03%
S.2	563	11.18%
S.1	3.174	63.03%
D.IV	97	1.93%
D.III	463	9.19%
D.II	48	0.96%
D.I	10	0.19%
SLTA	635	12.62%
SLTP	35	0.70%
SD	9	0.17%
Total	5.036	100%

Sumber : BKD Kab. Sidrap keadaan Desember 2019

Data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sidrap berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan variasi yang signifikan di antara jenjang pendidikan yang dimiliki. Dari total 5.036 PNS, mayoritas pegawai memiliki gelar Sarjana (S.1),

dengan jumlah mencapai 3.174 orang atau 63,03% dari keseluruhan. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan Magister (S.2) berjumlah 563 orang, yang setara dengan 11,18%. Di jenjang pendidikan Diploma IV (D.IV), terdapat 97 pegawai atau 1,93%, dan Diploma III (D.III) sebanyak 463 pegawai, yang mencakup 9,19% dari total. Selain itu, pegawai dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA) mencapai 635 orang atau 12,62%, sedangkan jenjang pendidikan yang lebih rendah, seperti Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD), masing-masing memiliki 35 pegawai (0,70%) dan 9 pegawai (0,17%). Terdapat juga pegawai dengan pendidikan Diploma II (D.II) sebanyak 48 orang (0,96%) dan Diploma I (D.I) sebanyak 10 orang (0,19%). Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar PNS di Kabupaten Sidrap memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, terutama pada jenjang S.1, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Kesiapan SDM dalam penerapan SPBE

Kompetensi pegawai di Kabupaten Sidrap terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menunjukkan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah Kabupaten Sidrap telah mengadakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Ketenagakerjaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam berbagai aspek teknologi dan manajemen. Pj Bupati Sidrap, H. Basra, menekankan pentingnya pelatihan ini agar SDM dapat bersaing secara nasional dan internasional, serta memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Selain itu, peluncuran aplikasi SiPeNgaja (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) merupakan langkah konkret dalam transformasi digital di Kabupaten Sidrap. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Sebanyak 332 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan aplikasi ini, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengadopsi teknologi informasi.



Gambar 7. Peningkatan SDM Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Sidrap (Website Kab. Sidrap)

Dukungan Kebijakan dan Program

Dukungan kebijakan dan program terkait penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Sidenreng Rappang sejalan dengan visi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang tertuang dalam Renstra 2015-2019, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, dengan penekanan pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing tinggi (Vinet & Zhedanov, 2011). Salah satu fokus Kominfo adalah menyediakan infrastruktur TIK yang mendukung pemerataan akses internet dan komunikasi, termasuk di daerah-daerah seperti Sidrap, guna menciptakan layanan pemerintahan yang efisien, aman, dan terjangkau.

a. Dukungan Kebijakan

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE*. Dukungan ini juga diwujudkan melalui *Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE di Sidrap*. Kebijakan tersebut menekankan perlunya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan, dengan tujuan mencapai pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini juga mendorong Sidrap untuk terus mengembangkan infrastruktur digital sebagai pondasi bagi implementasi SPBE, termasuk sistem pembayaran non-tunai dan berbagai layanan publik lainnya.

Kesiapan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan SPBE juga sangat bergantung pada pencapaian sasaran Renstra Dinas Kominfo, seperti memperluas jangkauan internet, yang akan memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan digital. Dengan meningkatnya infrastruktur TIK, data statistik sektoral yang diolah dan disebarluaskan secara efisien akan berfungsi sebagai bahan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Kesiapan ini juga diperkuat oleh penerapan standar keamanan informasi, seperti penggunaan bahasa sandi, untuk melindungi data dan komunikasi internal pemerintah, yang menjadi komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan efisien di Sidrap.

Tabel 5. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

RPJM		Renstra PD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya akutanbilitas kinerja Pemerintah Daerah	• Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan Komunikasi Publik • Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik • Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan Keamanan data	• Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet. • Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa • Meningkatnya data/informasi / statistic sektoral sebagai bahan untuk perencanaan oembangunan • Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi

Sumber: Data diolah 2024

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) memiliki tujuan dan sasaran yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan kesiapan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). RPJM menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran utama berupa peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan tujuan Renstra PD, yang mengarah pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi melalui komunikasi publik, kualitas layanan data statistik, serta keamanan data. Peningkatan jangkauan infrastruktur internet menjadi sasaran kunci, yang memungkinkan perluasan akses layanan digital kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap. Selain itu, penyebarluasan informasi melalui kerjasama media massa berperan dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, mendukung transparansi, dan mendorong partisipasi publik. Renstra PD juga menargetkan penyediaan data/informasi statistik sektoral yang lebih baik untuk menunjang perencanaan pembangunan yang akurat dan relevan. Dalam aspek keamanan informasi, Renstra PD menekankan pentingnya perangkat daerah menggunakan bahasa sandi dalam komunikasi internal sebagai langkah perlindungan data, yang juga menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan SPBE yang aman dan efisien. Kolaborasi sasaran dalam RPJM dan Renstra PD ini memperlihatkan pendekatan yang komprehensif untuk memajukan digitalisasi pemerintahan di Sidrap, menciptakan fondasi yang kuat bagi implementasi SPBE yang terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian. Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Sub Kegiatannya adalah:

- Pengeloaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- Pengelolaan media komunikasi publik
- Pelayanan informasi publik
- Layanan hubungan media
- Penguatan Kapasitas sumber Daya komunikasi publik
- Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
- Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatannya adalah :

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah
- Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)

Kesimpulan

Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perkembangan signifikan dalam kesiapan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditandai dengan peningkatan infrastruktur digital, kompetensi sumber daya manusia (SDM), implementasi layanan *e-Government*, dan dukungan kebijakan yang memadai. Peningkatan infrastruktur teknologi, khususnya penyebaran jaringan 4G/LTE, telah memungkinkan akses yang lebih luas ke layanan *e-Government* di sebagian besar wilayah Kabupaten Sidrap, meskipun masih terdapat beberapa desa yang membutuhkan penguatan infrastruktur agar pelayanan berbasis digital dapat dinikmati secara merata. Kompetensi SDM dalam pemerintahan menjadi faktor kunci yang mendukung efektivitas SPBE. Berbagai pelatihan berbasis kompetensi telah dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan pegawai, khususnya dalam operasional aplikasi-aplikasi digital yang digunakan dalam pelayanan publik. Adanya SDM dengan latar belakang pendidikan yang baik juga berperan penting dalam mendukung implementasi ini. Kehadiran layanan *e-government* yang terintegrasi ini mencerminkan upaya Kabupaten Sidrap untuk memperkuat infrastruktur digital dan kesiapan SDM, yang merupakan bagian penting dari implementasi SPBE. Layanan digital yang disediakan oleh berbagai dinas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah, mengurangi hambatan geografis, dan mempercepat proses layanan administrasi. Dengan demikian, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui platform digital. Pada sisi lain, berbagai layanan *e-Government*, seperti portal pemerintah dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Sipengaja), telah diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memudahkan akses informasi serta memperkuat keterlibatan masyarakat. Lebih jauh, dukungan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 memperkuat landasan hukum untuk penerapan SPBE di Kabupaten Sidrap, mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kabupaten Sidrap menunjukkan kesiapan yang semakin matang dalam penerapan SPBE, namun beberapa aspek, seperti

pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital di masyarakat, masih perlu ditingkatkan agar SPBE dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Referensi

- Bisma, R. (2022). Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan. *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, 6(2), 73–79. <https://doi.org/10.26740/jieet.v6n2.p73-79>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Sidrapkab. (2016). *Dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak*. Sidrapkab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT--DESA--PER>
- Dinas Pol PP. (2024). *Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*. Sidrapkab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-SATUAN-POLISI-PAMONG-PRAJA-DAN-PEMADAM-K/1>
- Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). *Profil Dinas Komunikasi dan Informatika*. Dinas Komunikasi Dan Informatika. <https://diskominfo.samarindakota.go.id/laman/visi-dan-misi>
- Disdikbud Kb. Demak. (2020). *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak*. Disdikbud Sidrap. www.dindikbud.demakkab.go.id
- Dinkes. (2024). *Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB)*. Sidrapkab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-KESEHATAN--PENGENDALIAN-PENDUDUK-D/6>
- Dinsos. (2024). *Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil*. Sidrap Kab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-KEPENDUDUKAN-DAN-PENCATATAN-SIPIL/6>
- Diskominfo Sidrap. (2021). *Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan*. Diskominfo. <http://siapp.sidrapkab.go.id/>
- Diskop UKM. (2024). *Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi*. Sidrapkab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-KOPERASI--USAHA-KECIL--MENENGAH--T>
- Disperdagin. (2024). *Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Cirebon*. Sidrapkab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-PERDAGANGAN-DAN-PERINDUSTRIAN>
- Dispertan. (2024). *Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan*. Sidrapkab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-TANAMAN-PANGAN--HORTIKULTURA--PERK>
- Engkus, Aditiya, A. P. A., Lestari, C. D., & Alhuda, E. F. (2023). *Implementation of new Service development in the electronic-based government System (SPBE) in Sumedang*

- Regency. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial.
<https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/181>
- Jabarnur, A. M. (2022). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Dinas Komunikasi dan* <http://eprints.ipdn.ac.id/9247/>
- Juli Astuti, N. P., Sukarsa, I. M., & Sunia Raharja, I. M. (2021). Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia. *JITTER : Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 571. <https://doi.org/10.24843/JTRTI.2021.v02.i03.p16>
- Kemen PANRB. (2024). *Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2023*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023>
- Kemenpora. (2024). *Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata*. Sidrapkab. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-KEPEMUDAAN--OLAHRAGA-DAN-PARIWISAT>
- Sidrapkab (2013). *Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air*. <https://sidrapkab.go.id/site/instansi/detail/Instansi154150-DINAS-PENGLOLAAN-SUMBER-DAYA-AIR>
- La Adu, arifin, Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-Hambatan Dalam Implemetasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pada Pemerintah Daerah. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 215–223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Majapahit, S. A., & Hexagraha, A. (2021). Pengukuran e-Readiness Teknologi Informasi Pada Perangkat Pemerintahan Desa Panyocokan Jawa Barat Dalam Menuju Desa Berteknologi Informasi. *Journal of Information Systems and Informatics*, 3(3), 508–518. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v3i3.190>
- Miswar, M., Karnay, S., & Fatimah, J. M. (2022). *Transparency Analysis of Information Transparency In Procurement of Goods/Services Through The Media Website (E-Procurement) in Realizing Goods Governance in Polewali Mandar Regency*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. <https://proceedings.ums.ac.id/iceiss/article/view/1085/1061>
- Mulia, Y. (2016). *Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam bidang teknologi dan manajemen digital*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76156>
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). *E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia*. Juni. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/2337>
- Parta, N. P. W. (2023). *Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents. <https://ppid.dpmpstsp.jatengprov.go.id/sarpras/3/29>
- Pelaihari. (2017). *Definisi Lingkungan Hidup Indonesia | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup*. Sidrapkab. <https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/definisi-lingkungan-hidup>

indonesia

- Pemkab Sidrap. (2024). *Portal Resmi: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang*. Sidrapkab. <http://sidrapkab.go.id/>
- Rahmadi, A. N., Jibril, M., & Muhammad, A. (2021). Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Implementation of E-Government in Probolinggo (Study of Presidential Regulation Number 95 of 2018 Concerning Elect. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8002/6164>
- Sinta, D. D., Tunggal, S., & Info, A. (2024). Pelayanan Melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/societo/article/view/3498>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*. Alfabeta. https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf?_cf_chl_tk=3teEM01J7KjylPnFpIgvQLpTDktLiTXtsZRVmPi
- Suhartono, S., Arsyad, N., & Amelia, F. (2020). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada pemerintah desa tonasa dan desa mamampang, tombolo pao). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 336–353. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i3.142>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 18–21. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Zulkarnain. (2020). *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KALBAR*. 29 September. <https://dpk.kalbarprov.go.id/undang-undang-43-tahun-2007-tentang-perpustakaan/>